

Tata Kelola Desa dalam Transisi: Jaringan Kolaboratif, Strategi Ruang, dan Pembangunan Berkelanjutan

Muh Akbar Ali Darlis¹, Muhammad Ikbal², Akhwan Ali³

Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang¹

Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang²³

*E-mail: akbaralidarlis@gmail.com

ABSTRACT

This research focuses on the dynamics of village governance and development by highlighting the urgency of transformation towards an inclusive, transparent, collaborative, and adaptive governance model to global change. The background of this research is based on the fact that villages in developing countries face serious challenges, ranging from development gaps, the impacts of climate change, to the need for digitalization of governance. To address these challenges, this research uses a bibliometric approach with the Scopus database and the support of R-Studio Biblioshiny, VOSviewer, and CiteSpace analysis tools, which enable mapping of research trends, academic collaboration networks, thematic evolution, and the direction of development of village governance theory and practice. The main findings indicate that digital governance, including the implementation of e-Government and open data programs, has significant potential to increase transparency, accountability, and citizen participation, although it still faces obstacles such as inconsistent data quality, resistance to boundaries, and limited digital literacy. Furthermore, governance based on participation and collaboration between stakeholders has been shown to strengthen social cohesion, optimize the use of social capital, and increase the effectiveness of local development. Furthermore, the integration of spatial governance and socio-ecological resilience approaches plays a crucial role in strengthening rural adaptation to climate change and urbanization, while the development of rural tourism and agrotourism opens up strategic opportunities for transforming local resources into sustainable

economic value. The significance of this research lies in the novelty of the hybrid model that combines digital technology, social capital, and spatial-ecological governance as a framework for adaptive and contextual rural governance. Theoretically, the research findings enrich the literature on sustainable village governance, while practically, this research provides concrete recommendations for policymakers and local stakeholders to strengthen institutional capacity, encourage citizen engagement, and integrate digital innovation into inclusive, resilient, and long-term competitive village development.

Keywords: *Village Governance¹, Transition², Sustainable Development³*

ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada dinamika tata kelola desa dan pembangunan pedesaan dengan menyoroti urgensi transformasi menuju model tata kelola yang inklusif, transparan, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan global. Latar belakang penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa desa di negara berkembang menghadapi tantangan serius, mulai dari kesenjangan pembangunan, dampak perubahan iklim, hingga kebutuhan digitalisasi tata kelola. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan bibliometrik dengan basis data Scopus serta dukungan perangkat analisis R-Studio Biblioshiny, VOSviewer, dan CiteSpace, yang memungkinkan pemetaan tren riset, jejaring kolaborasi akademik, evolusi tematik, serta arah pengembangan teori dan praktik tata kelola desa. Temuan utama menunjukkan bahwa digital governance, termasuk implementasi e-government dan program open data, memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi warga, meskipun masih dihadapkan pada kendala berupa kualitas data yang tidak konsisten, resistensi birokrasi, dan keterbatasan literasi digital. Selain itu, tata kelola berbasis partisipasi dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan terbukti memperkuat kohesi sosial, mengoptimalkan penggunaan modal sosial, dan meningkatkan efektivitas pembangunan lokal. Lebih jauh, integrasi tata kelola spasial dan pendekatan resilien sosial-ekologis berperan penting dalam memperkuat adaptasi pedesaan terhadap

perubahan iklim dan urbanisasi, sementara pengembangan pariwisata pedesaan serta agrowisata membuka peluang strategis dalam mentransformasi sumber daya lokal menjadi nilai ekonomi yang berkelanjutan. Signifikansi penelitian ini terletak pada kebaruan model hibrid yang menggabungkan teknologi digital, modal sosial, dan tata kelola spasial-ekologis sebagai kerangka tata kelola pedesaan yang adaptif dan kontekstual. Secara teoritis, hasil penelitian memperkaya literatur mengenai tata kelola desa berkelanjutan, sedangkan secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lokal untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, mendorong keterlibatan warga, serta mengintegrasikan inovasi digital dalam pembangunan desa yang inklusif, resilien, dan berdaya saing jangka Panjang.

Kata Kunci: Tata Kelola Desa¹, Transisi², Pembangunan Berkelanjutan³

PENDAHULUAN

Penelitian ini menegaskan urgensi reformasi tata kelola desa sebagai respons atas dinamika pembangunan pedesaan yang semakin kompleks, multidimensional, dan saling berkelindan dengan perubahan sosial, ekonomi, serta teknologi. Desa tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai entitas administratif yang pasif menerima kebijakan dari pusat, melainkan sebagai arena strategis yang menuntut kapasitas adaptif, inovatif, dan partisipatif dalam mengelola sumber daya serta kepentingan publik. Dalam konteks ini, inisiatif digital governance dan penerapan prinsip open data terbukti menjadi katalis penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Akses terbuka terhadap informasi publik tidak hanya memperkuat mekanisme pengawasan sosial, tetapi juga membuka ruang baru bagi partisipasi warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan lokal, sebagaimana ditegaskan oleh berbagai studi sebelumnya. Namun demikian, penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa transformasi digital tidak dapat dilepaskan dari persoalan mendasar seperti kualitas dan validitas data, resistensi birokrasi yang masih kuat, serta kesenjangan literasi digital di tingkat masyarakat desa. Hambatan-hambatan

ini menuntut inovasi kebijakan yang tidak sekadar bersifat teknis, melainkan juga menyentuh aspek kelembagaan, budaya organisasi, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan (Chu & Chiang, 2014; Hidayat, 2025; Xia, 2017)

Kebaruan utama penelitian ini terletak pada integrasi e-government dengan praktik tata kelola berbasis komunitas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan desa akan lebih efektif ketika diiringi dengan pelibatan aktif warga sebagai subjek pembangunan, bukan hanya sebagai penerima layanan. Integrasi tersebut memperkuat legitimasi politik pemerintah desa karena keputusan publik dihasilkan melalui proses yang lebih terbuka, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, kualitas pelayanan publik juga meningkat karena kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Temuan ini memperkaya literatur tata kelola desa dengan menegaskan bahwa teknologi bukan tujuan akhir, melainkan instrumen yang harus dipadukan dengan modal sosial dan kapasitas lokal agar mampu menghasilkan dampak pembangunan yang berkelanjutan. (Jibladze et al., 2024; McNutt et al., 2016).

Penelitian ini menempatkan praktik kolaboratif dan partisipatif sebagai pilar utama dalam pembangunan desa. Model governance yang menekankan inklusivitas, dialog deliberatif, serta pembangunan kepercayaan antarpemangku kepentingan terbukti lebih adaptif dan responsif dibandingkan pendekatan teknokratis yang hierarkis. Dalam konteks pedesaan, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi pusat, tetapi sangat bergantung pada kemampuan aktor lokal untuk membangun jejaring sosial yang produktif dan berkelanjutan. Jejaring ini mencakup hubungan antara pemerintah desa, lembaga adat, kelompok masyarakat, organisasi sipil, hingga sektor swasta. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketika modal sosial tersebut terinstitusionalisasi dalam mekanisme tata kelola yang jelas, ia mampu mengurangi ketimpangan sosial, memperkuat kohesi komunitas, dan mendorong distribusi manfaat pembangunan yang lebih adil. Dengan demikian, aspek kebaruan yang ditawarkan terletak pada penegasan bahwa modal sosial bukan sekadar sumber daya kultural, tetapi dapat menjadi instrumen kebijakan yang strategis dalam pembangunan desa (Bettis et al., 2021; Fischer, 2012; Muzaqi et al., 2025)

Agenda revitalisasi pedesaan dalam penelitian ini juga menyoroti peran strategis tata kelola spasial dan ketahanan sosial-ekologis. Pembangunan desa yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari pengelolaan ruang yang adil dan berorientasi jangka panjang. Distribusi ruang yang timpang berpotensi memicu konflik agraria, degradasi lingkungan, serta eksklusi sosial, yang pada akhirnya melemahkan fondasi pembangunan desa itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya partisipasi multi-stakeholder dalam perencanaan tata ruang desa, termasuk pelibatan masyarakat lokal dalam menentukan arah pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, mekanisme adaptif dalam menghadapi perubahan iklim dan tekanan globalisasi menjadi elemen kunci dalam membangun ketahanan desa. Penekanan pada resiliensi sosial-ekologis menambahkan perspektif baru dalam literatur, dengan menempatkan desa sebagai ruang adaptasi dinamis yang mampu mengembangkan kapasitas internal untuk merespons krisis dan ketidakpastian (Edward & Nganyi, 2025; Fry et al., 2024).

Pariwisata pedesaan dan agrowisata ditunjukkan sebagai instrumen strategis dalam mengonversi keunggulan sumber daya lokal menjadi nilai ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini mengungkap bahwa pengembangan sektor ini tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga berpotensi memperkuat identitas lokal dan pelestarian lingkungan jika dikelola secara tepat. Namun demikian, keberhasilan pariwisata pedesaan sangat bergantung pada tata kelola kolaboratif yang melibatkan komunitas, pemerintah, dan sektor swasta secara seimbang. Tanpa mekanisme distribusi manfaat yang adil dan sistem kompensasi yang transparan, pariwisata justru berisiko memperlebar ketimpangan sosial dan merusak ekosistem lokal. Dengan menyoroti integrasi pariwisata berkelanjutan ke dalam agenda tata kelola desa, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa model hibrid yang menggabungkan inovasi ekonomi dengan keberlanjutan sosial-ekologis, sehingga pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kesejahteraan sosial dan lingkungan (LIU & YE, 2021a; Sun et al., 2021).

Penekanan pada resiliensi sosial-ekologis menambahkan perspektif baru terhadap literatur, menempatkan desa sebagai ruang adaptasi dinamis yang tidak

sekadar pasif menerima kebijakan pusat, tetapi mampu berinovasi dalam membangun kapasitas internal.

Di sisi lain, pariwisata pedesaan dan agrowisata ditunjukkan sebagai instrumen penting dalam mengonversi keunggulan sumber daya menjadi nilai ekonomi berkelanjutan. Namun, penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan model ini bergantung pada tata kelola kolaboratif yang melibatkan komunitas, pemerintah, dan sektor swasta, terutama dalam hal distribusi manfaat dan mekanisme kompensasi (Fan et al., 2024; Xue et al., 2024). Dengan menyoroti integrasi pariwisata berkelanjutan ke dalam agenda tata kelola, penelitian ini memberikan kebaruan berupa model hibrid yang menggabungkan inovasi ekonomi dengan keberlanjutan sosial-ekologis (Lin et al., 2023).

Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tata kelola desa dengan menekankan bahwa transformasi digital, penguatan modal sosial, dan integrasi spasial-ekologis adalah prasyarat bagi keberhasilan pembangunan pedesaan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk merancang kebijakan yang lebih partisipatif, adaptif, dan berbasis teknologi (Rahman et al., 2025; Sukri et al., 2025). Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat literatur tata kelola dan pembangunan berkelanjutan, tetapi juga memberikan panduan aplikatif yang signifikan untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan desa yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Setelah tahap pencarian awal, studi yang teridentifikasi disaring secara sistematis untuk mengeliminasi artikel yang tidak relevan, dengan menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi guna memastikan bahwa literatur yang dipertahankan benar-benar menjawab pertanyaan penelitian dan tetap berada dalam jumlah yang signifikan namun terkelola. Pencarian dibatasi pada publikasi antara 1 Januari 2010 hingga 25 September 2025 untuk menangkap evolusi riset terkini, meminimalkan bias historis, serta menjaga relevansi temuan dengan dinamika pembangunan pedesaan kontemporer. Kriteria inklusi mencakup artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris, diterbitkan sebagai artikel jurnal ilmiah terindeks berupa research articles

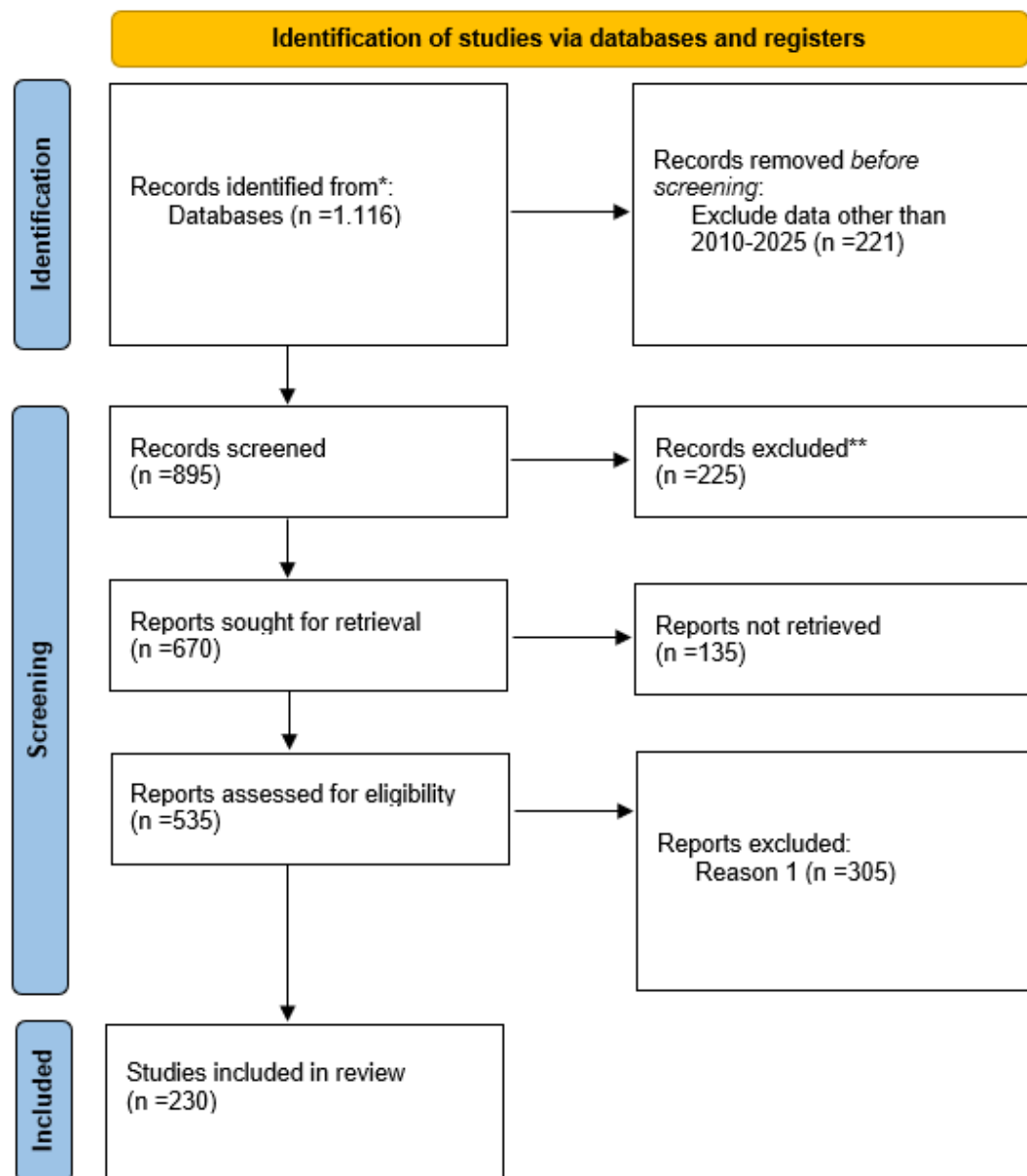
atau review papers, secara langsung membahas isu tata kelola desa, pemerintahan pedesaan, pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat, urbanisasi, dan keberlanjutan di negara berkembang, serta menggunakan versi publikasi paling mutakhir apabila suatu studi terbit dalam lebih dari satu versi. Sebaliknya, artikel yang tidak ditulis dalam bahasa Inggris, berbentuk editorial, buku, bab buku, prosiding, laporan singkat, atau poster, hanya berisi rekomendasi kebijakan tanpa analisis empiris atau metodologi yang jelas, memiliki metodologi yang tidak memadai, berjumlah kurang dari lima halaman, atau tidak tersedia dalam akses teks penuh dikecualikan dari analisis. Strategi pencarian data dilakukan pada basis data Scopus dengan menggunakan kata kunci (*“village governance” AND “e-government”*), yang menghasilkan 1.116 dokumen terkait tata kelola pedesaan dan pembangunan berkelanjutan di negara berkembang, kemudian diekspor ke MS Excel 365 untuk pengelolaan metadata seperti judul, abstrak, kata kunci, tahun publikasi, dan bidang kajian. Selanjutnya, dengan mengikuti pedoman PRISMA dan memanfaatkan PRISMA 2020 *flowchart*, dilakukan proses identifikasi, penyaringan, dan penilaian kelayakan secara terstruktur melalui penyaringan tahun publikasi, bahasa, jenis publikasi, dan relevansi bidang ilmu sosial, hingga akhirnya diperoleh 230 studi yang dimasukkan dalam tinjauan akhir, sehingga memastikan bahwa artikel yang dianalisis selaras dengan tujuan penelitian dalam memetakan pendekatan tata kelola pedesaan dan praktik pembangunan berkelanjutan di negara berkembang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

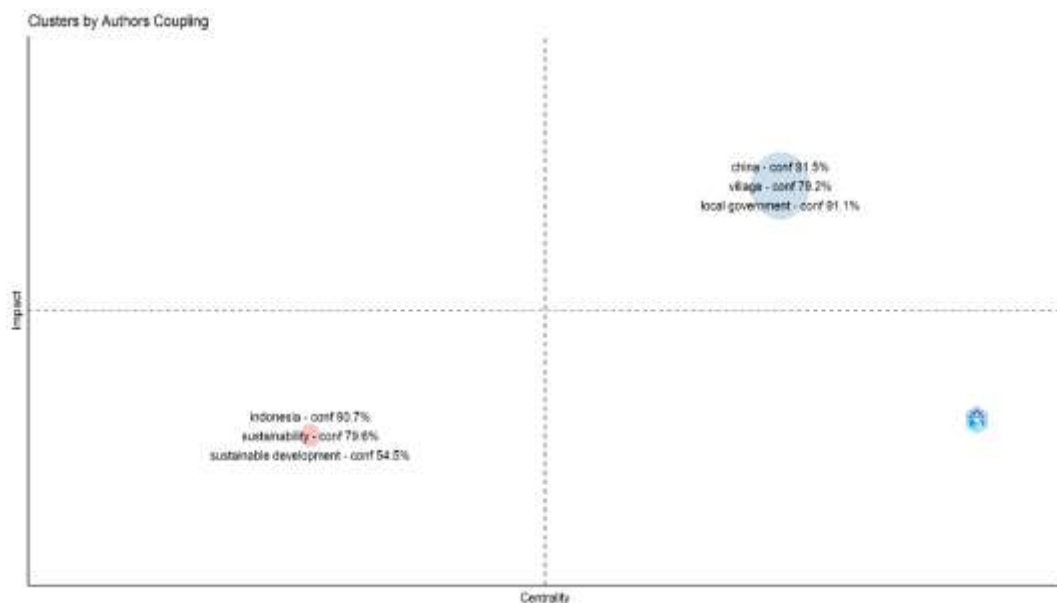
Data Analysis and Visualizatio

Bibliometric analysis was conducted by selecting 230 documents to construct a bibliometric mapping of rural governance and sustainable development studies. VOSviewer was applied to visualize the literature network, identify co-authorship links, and highlight thematic relationships across documents (Nurmandi et al., 2021; Syahputra et al., 2023). CiteSpace was employed for keyword co-occurrence and network visualization, enabling the detection of emerging themes

and research frontiers in village governance (Lawelai & Nurmandi, 2024). Furthermore, RStudio-Biblioshiny complemented the analysis by providing advanced statistical tools, including trend topics, thematic evolution, tree maps, and authors' coupling, thereby offering a comprehensive visualization of the structural and dynamic patterns of the field (Barbosa, 2021).



Gambar 1. Diagram PRISMA yang dimodifikasi menggambarkan proses penyaringan artikel dalam tinjauan sistematis.



Gambar 2. Authors Coupling Jaringan Kolaboratif, Strategi Ruang, dan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Pemrosesan data menggunakan RStudio

Gambar 2 mengidentifikasi dua klaster utama yang mencerminkan arah diskursus akademik mengenai tata kelola pedesaan. Klaster pertama, yang berpusat pada *China*, *village*, dan *local government*, menunjukkan tingkat keterhubungan yang sangat tinggi (91,5%; 79,2%; 91,1%), menandakan bahwa literatur mengenai China memiliki sentralitas yang kuat dalam membentuk kerangka konseptual global. Riset di China menegaskan pergeseran paradigma dari pola manajemen menuju tata kelola berbasis hak yang mengintegrasikan resiliensi sosial-ekologis dalam praktik pemerintahan desa–kota (LIU & YE, 2021a; Xu et al., 2021). Hal ini diperkuat dengan partisipasi multi-aktor, mulai dari komite desa, LSM, hingga sektor swasta (X. Wang et al., 2017). Serta restrukturisasi kelembagaan lokal sejak awal 2000-an untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan (Ahlers et al., 2016). Selain itu, penguatan identitas budaya dan kapasitas deliberatif masyarakat terbukti memperkuat partisipasi dalam tata kelola (X. Wang et al., 2017). Sementara inovasi digital governance, tata ruang, dan kebijakan berbasis insentif lahan semakin mendorong keberhasilan revitalisasi pedesaan (Qu et al., 2025; Sun et al., 2021; T. Wang et al., 2024).

Sebaliknya, klaster kedua yang berfokus pada *Indonesia, sustainability*, dan *sustainable development* menempati posisi dengan tingkat keterhubungan menengah (90,7%; 79,6%; 54,5%), menunjukkan kontribusi signifikan meski belum sekuat China. Literatur Indonesia menekankan pentingnya memperkuat kapasitas desa dalam menghadapi tantangan pembangunan dan migrasi, di mana lemahnya respons tata kelola desa mempertahankan pola migrasi lama (Nurlinah et al., 2020). Program Desa SDGs juga dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan koordinasi pemangku kepentingan, sehingga dibutuhkan pendekatan kontekstual yang lebih adaptif (Setha, 2024). Dalam konteks pariwisata, birokrasi politik hanya berperan minimal dalam mendorong dukungan masyarakat, sehingga pemberdayaan dan kesadaran komunitas menjadi faktor penentu keberlanjutan (Amir et al., 2024). Model berbasis komunitas menjaga kepemilikan lahan serta meningkatkan posisi tawar masyarakat (Yang et al., 2024). Sementara agrowisata dan tata kelola pariwisata partisipatif menekankan pentingnya kolaborasi multi-aktor (Asdar & Abdullah, 2024; Zulgani et al., 2023). Dengan demikian, riset China berkontribusi pada pengembangan kerangka konseptual dan kelembagaan, sedangkan Indonesia memberikan kontribusi praksis yang berbasis komunitas, keduanya saling melengkapi dalam memperkaya literatur global mengenai tata kelola pedesaan berkelanjutan

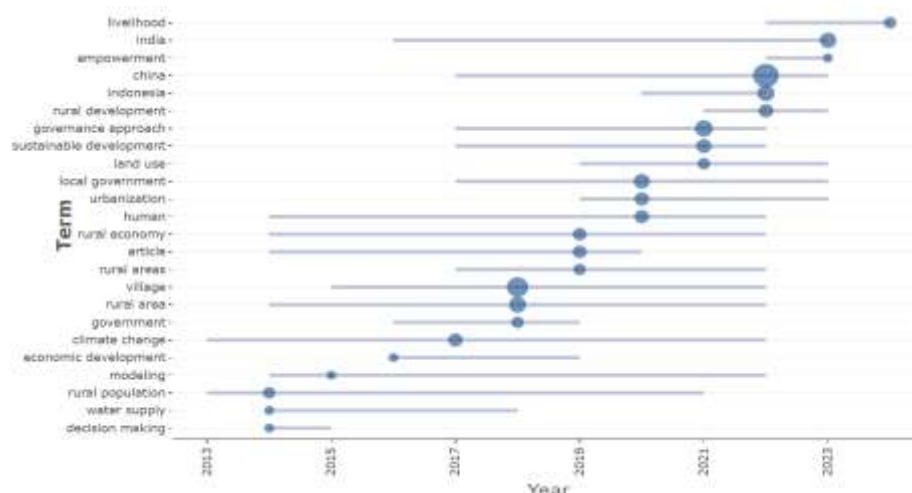


Gambar 3: Topik munculnya Integrasi Teknologi dan Pengembangan Desa Pintar.

Sumber: Pemanfaatan RStudio dalam konteks pemrosesan data.

Gambar 3 menunjukkan dominasi kata kunci seperti village, governance approach, rural area, local government, rural development, urbanization, sustainable development, dan sustainability. Pola ini menegaskan bahwa dalam konteks negara berkembang, desa merupakan arena utama tata kelola yang sangat menentukan efektivitas pembangunan lokal. Pendekatan tata kelola yang partisipatif, transparan, dan akuntabel memungkinkan pemerintah desa meningkatkan layanan publik sekaligus memperkuat legitimasi kelembagaan (Handayani et al., 2023). Pada saat yang sama, pemerintah daerah pedesaan menjadi aktor strategis dalam mengoordinasikan program pembangunan dan memastikan pengelolaan sumber daya yang berorientasi pada keberlanjutan (Budiono et al., 2024; Purnamasari et al., 2024).

Selain itu, frekuensi kemunculan kata urbanization dan sustainable development mencerminkan pentingnya integrasi tata kelola desa dalam merespons dinamika global. Urbanisasi mengubah relasi desa–kota sehingga menuntut tata kelola adaptif yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan (LIU & YE, 2021b). Untuk itu, pembangunan desa harus diarahkan pada prinsip kolaboratif dan inklusif, termasuk dengan mengembangkan sektor-sektor berbasis partisipasi masyarakat seperti pariwisata pedesaan, yang terbukti efektif mendukung keberlanjutan (Ćurčić et al., 2021; Valderrama et al., 2025). Word cloud ini dengan demikian memperlihatkan keterhubungan erat antara tata kelola, pembangunan pedesaan, dan keberlanjutan sebagai fondasi utama transformasi desa di negara berkembang.



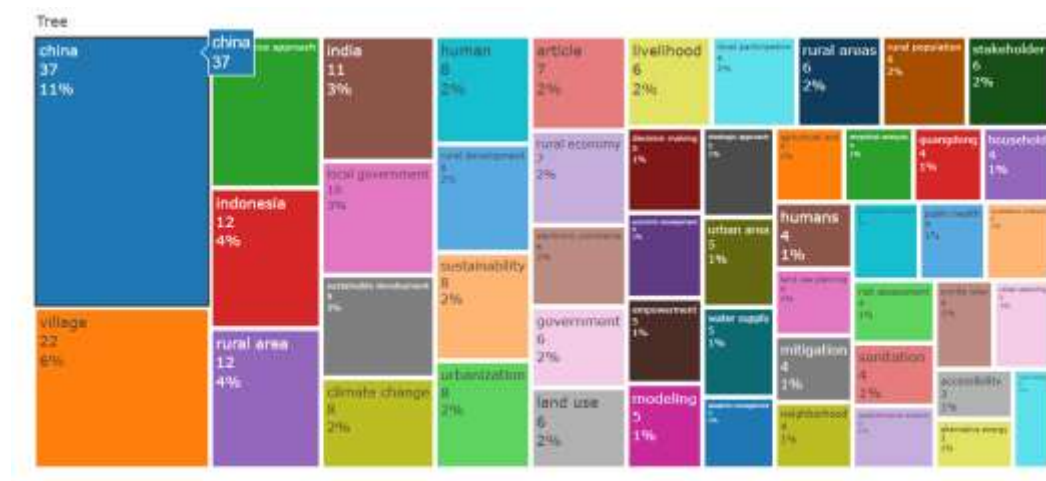
Gambar 4. Tren topik Jaringan Kolaboratif, Strategi Ruang, dan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Pemrosesan data menggunakan RStudio

Gambar 4 menunjukkan bahwa studi mengenai tata kelola desa di negara berkembang mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan teknokratis menuju kerangka multidimensi yang menekankan kolaborasi, partisipasi, dan pemberdayaan komunitas. Konsep collaborative governance terbukti vital dalam pembangunan desa wisata berkelanjutan, sebagaimana ditunjukkan pada kasus Karangreja di Indonesia, di mana keterlibatan pemerintah, masyarakat, dan organisasi sipil mampu memperkuat kapasitas kelembagaan meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya dan dinamika kekuasaan (Nuraini et al., 2025). Sejalan dengan itu, pendekatan community empowerment menjadi instrumen strategis dalam mengintegrasikan energi, pendidikan, inovasi, dan pengembangan sosial sebagai fondasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti yang dipraktikkan dalam proyek ALMIA di Spanyol (del Arco et al., 2021).

Penelitian menekankan bahwa pembangunan pedesaan berkelanjutan harus menyeimbangkan keamanan pangan, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan sosial budaya, dengan usaha kecil berperan penting menjaga ketahanan ekonomi lokal (Abilova et al., 2021). Pergeseran dari strategi pembangunan top-down ke partisipatif memperkuat kapasitas lokal namun juga menimbulkan perdebatan tentang relasi kuasa (Storey, 2009). Di China, spatial governance terbukti meningkatkan layanan publik dan nilai aset ruang melalui koordinasi multi-aktor, meski tantangan koordinasi tetap ada (Sun et al., 2021). Pada saat yang sama,

participatory governance mendorong transisi desa pertanian menuju destinasi wisata berkelanjutan dengan menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi (Sgroi, 2022). Faktor kepemimpinan transformatif memperkuat kapasitas adaptif masyarakat (DAVIES, 2009), sementara jejaring kemitraan komunitas meningkatkan kualitas layanan sosial di wilayah marjinal (M. Zhang et al., 2018). Terakhir, solusi teknologi hanya efektif jika diseimbangkan dengan kebutuhan sosial, sehingga prinsip *smart living* menekankan keberlanjutan berbasis komunitas daripada sekadar modernisasi teknis (Zavratnik et al., 2020).

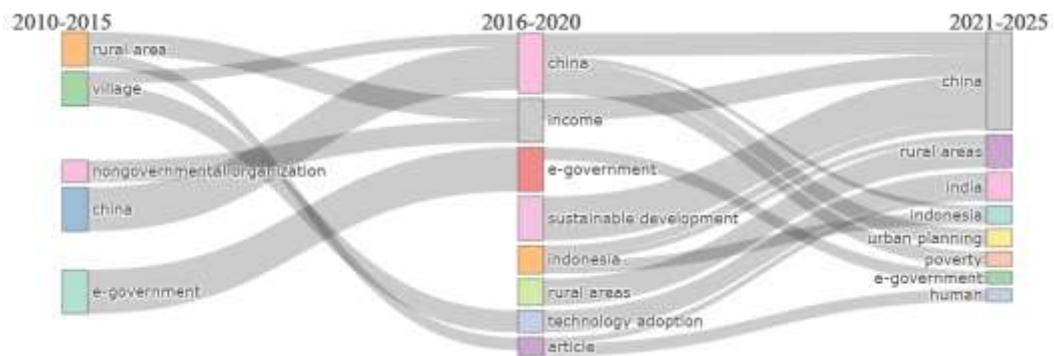


Gambar 5 . Tree Map topik Jaringan Kolaboratif, Strategi Ruang, dan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Pemrosesan data menggunakan RStudio

Gambar 5 menunjukkan bahwa studi mengenai tata kelola desa dan pembangunan pedesaan paling dominan di China, diikuti Indonesia dan India, menandakan Asia sebagai laboratorium utama kajian rural governance. Di China, pembangunan pedesaan dilakukan melalui model multi-aktor yang melibatkan komite desa, koperasi, LSM, hingga sektor swasta, dengan fokus pada peningkatan layanan publik, pengelolaan ruang, dan pemberdayaan ekonomi lokal (Sun et al., 2021; X. Wang et al., 2017). Namun, arus urbanisasi yang cepat menimbulkan tantangan berupa hilangnya identitas budaya serta inefisiensi tata kelola, sehingga penguatan kapasitas partisipatif dan identitas komunitas menjadi syarat bagi efektivitas pembangunan (Yao et al., 2018a). Pergeseran paradigma dari

manajemen menuju tata kelola berbasis hak, dengan keterlibatan berbagai pihak, menunjukkan transformasi menuju pola ko-kelola desa–kota yang lebih resilien (YE et al., 2021). Kesuksesan revitalisasi pedesaan di China bahkan ditopang oleh kepemimpinan komunitas, konsistensi kebijakan, serta investasi infrastruktur yang berhasil menghapus kemiskinan ekstrem pada 2020 (Mugambwa et al., 2025). Temuan serupa di Indonesia menegaskan bahwa penerapan prinsip good governance berpengaruh langsung terhadap kinerja pemerintah desa dan persepsi publik, sementara partisipasi masyarakat menjadi fondasi bagi legitimasi kebijakan (Handayani et al., 2023). Kendati demikian, pendekatan yang masih hierarkis dan teknokratis membatasi inovasi lokal, sehingga diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan serta keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan (Ahmad Iman Sukri et al., 2025). Model pembangunan berbasis komunitas, seperti pertanian terpadu dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, menjanjikan arah pembangunan yang lebih berkelanjutan, meski masih membutuhkan perbaikan kelembagaan, strategi keuangan, dan pendampingan jangka panjang (Sambodo et al., 2023). Di sisi lain, masalah migrasi memperlihatkan keterkaitan erat antara lemahnya tata kelola desa dan tantangan pembangunan, sehingga peningkatan kapasitas pemerintahan lokal menjadi kunci (Nurlinah et al., 2020). Sebagai perbandingan, sistem Panchayati Raj di India menunjukkan keberhasilan dalam mendorong partisipasi politik warga, yang dapat menjadi rujukan dalam memperkuat demokratisasi desa di Indonesia (Ahmad Iman Sukri et al., 2025). Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi partisipasi, kepemimpinan komunitas, dan inovasi tata kelola sebagai faktor kunci keberhasilan pembangunan pedesaan berkelanjutan.

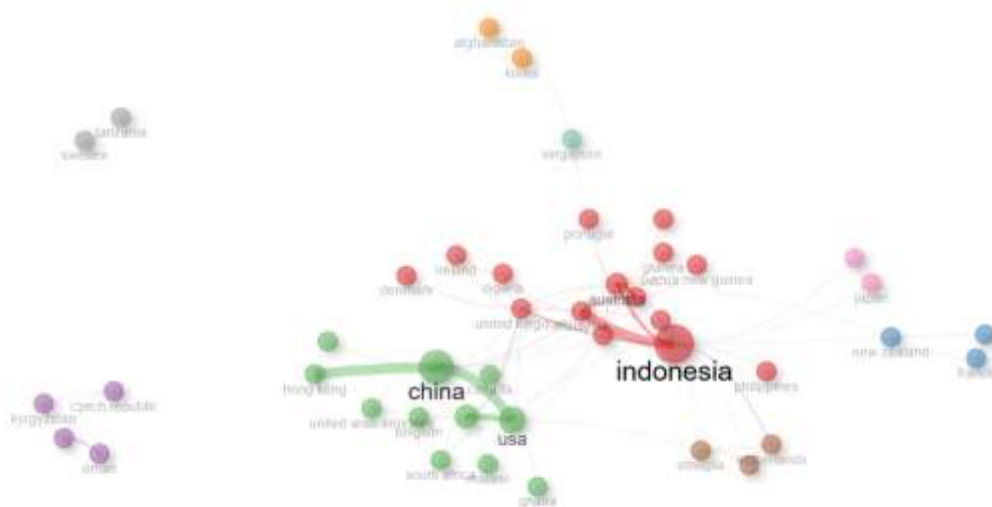


Gambar 7. Evolusi topik Jaringan Kolaboratif, Strategi Ruang, dan Pembangunan Berkelanjutan
 Sumber: Pemrosesan data menggunakan RStudio

Gambar 6 menunjukkan bahwa diskursus akademik mengenai tata kelola pedesaan di China, India, dan Indonesia mengalami transformasi yang semakin kompleks, dengan penekanan pada integrasi kelembagaan lokal, partisipasi komunitas, dan inovasi teknologi sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Di China, pergeseran dari paradigma manajemen menuju tata kelola berbasis hak dan kelola desa–kota menegaskan pentingnya pendekatan sosial-ekologis dalam mengatasi tantangan pedesaan (YE et al., 2021). Urbanisasi yang cepat memicu fenomena hollowing-out, di mana migrasi tenaga kerja muda melemahkan struktur sosial desa, sehingga penguatan identitas budaya dan kapasitas deliberatif menjadi krusial untuk mendorong partisipasi warga (Yao et al., 2018b). Penerapan spatial governance terbukti meningkatkan layanan publik, organisasi kolektif, serta nilai aset ruang (Sun et al., 2021). sementara LSM berperan penting dalam perbaikan lingkungan dan koperasi desa mendorong penguatan ekonomi lokal (X. Wang et al., 2017). Di sisi lain, struktur kelembagaan formal seperti komite desa dan partai tetap menjadi penopang utama dalam mengelola tanah, ekonomi, dan kesejahteraan sosial (Joseph, 2024).

India menampilkan pola yang relatif berbeda dengan menekankan pemanfaatan e-government sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan layanan publik, meskipun hambatan berupa keterbatasan literasi digital dan infrastruktur masih membatasi efektivitas implementasi (Suresh Kumar & Joseph, 2016). Kebijakan Sustainable Rural Development memperkuat kapasitas tata kelola lokal melalui pengambilan keputusan yang lebih inklusif dan

kepemimpinan desa yang efektif (Rahman et al., 2025). Skema seperti MGNREGA menunjukkan bagaimana infrastruktur air berbasis partisipasi komunitas mampu meningkatkan ketahanan iklim dan irigasi dengan dukungan kuat organisasi masyarakat sipil (Mehta et al., 2024). Di Indonesia, tema pembangunan pariwisata pedesaan menegaskan bahwa keberhasilan tidak hanya dipengaruhi birokrasi politik, melainkan juga oleh kesadaran dan pemberdayaan masyarakat lokal (Mehta et al., 2024). Perbandingan lintas negara memperlihatkan kesamaan bahwa peran LSM menjadi motor penting perubahan sosial-lingkungan (Das & Takahashi, 2009; X. Wang et al., 2017). Sementara kepemimpinan komunitas berperan sentral dalam mengimplementasikan revitalisasi pedesaan yang berkelanjutan (Mugambwa et al., 2025). Dengan demikian, temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola pedesaan di negara berkembang menuntut integrasi partisipasi multi-aktor, adopsi teknologi, dan kepemimpinan lokal yang adaptif.



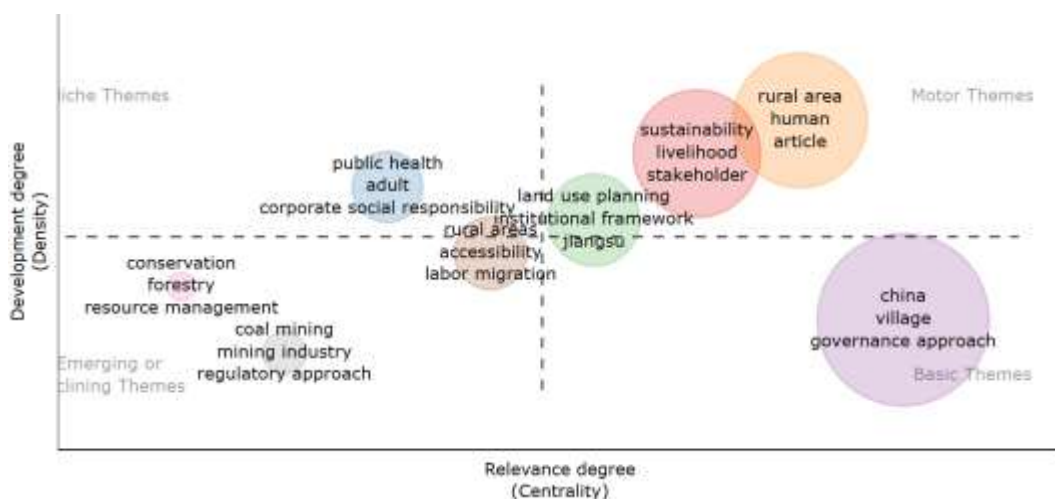
Gambar 7. Collaboration Network Jaringan Kolaboratif, Strategi Ruang, dan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Pemrosesan data menggunakan RStudio

Gambar 7 menunjukkan bahwa kolaborasi penelitian menegaskan bahwa jejaring riset internasional berperan vital dalam meningkatkan kualitas, visibilitas, dan dampak publikasi ilmiah. Kolaborasi lintas negara yang terukur melalui publikasi bersama terbukti memperkaya pertukaran pengetahuan, meningkatkan

sitasi, serta memperluas pengaruh riset secara global (Geng et al., 2022; Low et al., 2014). Meski demikian, kawasan Asia-Pasifik masih menghadapi hambatan struktural seperti keterbatasan finansial, jarak geografis, perbedaan bahasa, dan kurangnya dukungan kelembagaan (Sugiyama et al., 2017). Dalam konteks institusional, kolaborasi universitas–industri, khususnya melalui afiliasi ganda, menciptakan jejaring pengetahuan yang lebih kuat dan berjangka panjang (Ljungberg et al., 2025). Pendekatan analitik berbasis big data, seperti Spatio-Temporal Graph Convolutional Network, semakin memperjelas dinamika spasial dan temporal kolaborasi dengan memetakan hubungan antarpengulis, kata kunci, dan institusi (Hu et al., 2025).

Pada level global, kolaborasi jangka panjang dapat dipandang sebagai hubungan simbiotik, di mana keahlian dan sumber daya yang saling melengkapi meningkatkan performa ilmiah secara signifikan (J. Liu et al., 2023). Asia-Pasifik, terutama China, tampil sebagai pusat kolaborasi global yang memperluas jejaring ke Pasifik Barat, meskipun masih menghadapi tantangan regional (Benavent-Pérez et al., 2012; Huang et al., 2021). Kolaborasi AS–China, meski kini menunjukkan tren penurunan, tetap menjadi motor utama dalam produksi pengetahuan global dan difusi inovasi (Kitajima & Okamura, 2025; Tang & Hu, 2013). Universitas top di China semakin memperkuat jaringan dengan AS, Inggris, Australia, Hong Kong, serta negara-negara mitra Belt and Road, yang berimplikasi langsung pada peningkatan kinerja akademik (D. Zhang et al., 2022). Lebih jauh, penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara kolaborasi internasional dengan mutu riset, termasuk manfaat signifikan bagi peneliti muda melalui keterhubungan tidak langsung dengan jejaring transnasional (Chen et al., 2025; D. Zhang et al., 2022). Analisis ko-otor dan rekomendasi kolaborasi berbasis (Andrade et al., 2025; Hoang et al., 2019; G. M. Liu et al., 2023). Menegaskan bahwa penguatan kerjasama global bukan hanya memperluas akses pengetahuan, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menjawab tantangan pembangunan global.



Gambar 8. Thematic Map Jaringan Kolaboratif, Strategi Ruang, dan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: Pemrosesan data menggunakan RStudio

Gambar 8 menunjukkan bahwa riset pembangunan pedesaan dan tata kelola di China bergerak pada integrasi antara keberlanjutan, partisipasi komunitas, dan inovasi kelembagaan. Pada kluster Motor Themes, topik seperti sustainability, livelihood, stakeholder, dan rural area menjadi penggerak utama karena berhasil menghubungkan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pendekatan berbasis resiliensi sosial-ekologis mendorong terbangunnya tata kelola desa-kota yang adaptif melalui perencanaan, partisipasi, dan kebijakan multi-level (LIU & YE, 2021b). Strategi pembangunan pedesaan China menargetkan desa sebagai ruang hidup berdaya tarik pada 2050, berfokus pada ketahanan pangan, pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, dan pengentasan kemiskinan (Xu et al., 2021). Kunci keberhasilan strategi ini adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya, yang terbukti meningkatkan kesadaran, efektivitas distribusi, dan rasa memiliki warga (Feng et al., 2024; Kadam, 2024; Wikantiyoso et al., 2021).

Sementara itu, Basic Themes seperti China, village, governance approach tetap berperan sebagai fondasi konseptual utama yang menjelaskan kerangka teoritis tata kelola desa, meski pengembangannya relatif kurang intensif. Kajian mengenai pariwisata pedesaan berkelanjutan memperlihatkan bahwa model pembangunan berbasis komunitas dapat menjaga keseimbangan antara

pertumbuhan ekonomi dan pelestarian budaya (Feng et al., 2024). Sementara tata kelola multi-level dalam pariwisata rendah karbon menuntut kebijakan adaptif yang peka terhadap konteks lokal (Feng et al., 2024). Dalam hal environmental governance, partisipasi petani dipengaruhi oleh persepsi keadilan sosial dan kekuatan jejaring komunitas (Hou et al., 2024). Selaras dengan temuan global mengenai keterkaitan pengelolaan sumber daya dengan peningkatan penghidupan (Black & Cobbinah, 2017; Mbaiwa, 2011). Lebih jauh, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada fleksibilitas kelembagaan serta keterlibatan multipihak pemerintah, komite desa, LSM, dan sektor swasta dalam membangun tata kelola yang inklusif (Liangco et al., 2024). Meski demikian, tantangan besar masih ada, mulai dari implementasi desentralisasi di bawah kendali pusat (Xu et al., 2021). Hambatan partisipasi akibat faktor sosial-ekonomi (Chunga et al., 2023; Feng et al., 2024). Hingga kesenjangan dalam pengelolaan air dan hutan (Asbetsadik et al., 2025). Dengan demikian, peta tematik ini menegaskan perlunya tata kelola adaptif yang mampu mengintegrasikan keberlanjutan, partisipasi komunitas, dan kerangka kelembagaan inovatif untuk mewujudkan pembangunan pedesaan berkelanjutan.

Dinamika tata kelola desa di negara berkembang memperlihatkan variasi model yang memengaruhi efektivitas pembangunan lokal. Di Tiongkok, pola *supportive agency* menunjukkan bagaimana elit desa memanfaatkan alokasi sumber daya untuk mempertahankan dominasi, yang sering menimbulkan diferensiasi sosial dan melemahkan otonomi desa (Shi & Dong, 2022). Sebaliknya, di Indonesia tata kelola masih cenderung hierarkis dan teknokratis, sehingga menghambat inovasi berbasis komunitas. Perbandingan dengan India dan Jerman menegaskan bahwa menggabungkan partisipasi masyarakat dengan penguatan kapasitas kelembagaan dapat membentuk tata kelola yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Ahmad Iman Sukri et al., 2025).

Selain itu, pemberdayaan masyarakat berbasis modal social melalui ikatan bonding, bridging, dan linking terbukti memperkuat harmoni sosial dan partisipasi warga, meskipun optimalisasi keterlibatan sektor swasta masih terbatas (ULUM, n.d.). Implementasi prinsip *good governance* seperti transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas juga menjadi kunci, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa

di Indonesia, meski masih menghadapi kesenjangan pemahaman di kalangan aparat (Susan & Budirahayu, 2018). Pada saat yang sama, inovasi digital melalui e-government berbasis AI dan IoT meningkatkan kualitas layanan publik (Al-Ansi et al., 2024). Sementara inisiatif *open data* memperkuat transparansi, meski menghadapi hambatan kualitas data dan resistensi birokrasi (Hidayat, 2025). Tantangan literasi digital tetap menjadi faktor pembatas partisipasi yang setara (Belkhamza, 2024).

Lebih jauh, pembangunan pedesaan berkelanjutan menuntut pendekatan multi-aktor dan holistik, seperti *Human-Centered Design–Participatory Rural Appraisal* yang efektif di India (Su et al., 2025). Dimensi ketahanan juga krusial, di mana komunitas pedesaan perlu memperkuat infrastruktur, mengadopsi praktik pertanian berkelanjutan, dan membangun organisasi mandiri untuk menghadapi bencana (Su et al., 2024; Ying et al., 2023). Di sisi lain, pariwisata pedesaan dan agrowisata muncul sebagai strategi revitalisasi, dengan contoh Afrika Selatan yang menunjukkan bahwa integrasi pariwisata dengan praktik pertanian mampu mendukung mata pencaharian lokal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan (Ramaano, 2025). Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa tata kelola desa yang efektif bergantung pada sinergi antara kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, digitalisasi, dan strategi keberlanjutan berbasis lokal.

KESIMPULAN

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa tata kelola desa dan pembangunan pedesaan di negara berkembang dibentuk oleh interaksi kompleks antara kapasitas kelembagaan, tingkat partisipasi komunitas, transformasi digital, dan strategi keberlanjutan, di mana setiap konteks nasional menunjukkan pola yang berbeda. Analisis memperlihatkan bahwa Tiongkok menonjol melalui restrukturisasi kelembagaan yang kuat, penguatan tata kelola spasial, serta pemanfaatan inovasi digital sebagai instrumen utama revitalisasi pedesaan, sementara Indonesia lebih menekankan pendekatan berbasis komunitas, pemberdayaan sosial, dan adaptasi kebijakan yang kontekstual dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Perbedaan ini menegaskan bahwa tidak terdapat satu

model tunggal yang mampu menjawab kompleksitas tata kelola pedesaan, melainkan diperlukan model hibrid yang mampu mengombinasikan kapasitas negara dengan kekuatan partisipatif masyarakat. Implikasi dari temuan ini bersifat teoritis dan praktis, karena secara konseptual penelitian ini memperluas kerangka tata kelola pedesaan dengan menekankan pentingnya pendekatan kolaboratif yang menjembatani struktur formal dan dinamika lokal, sementara secara praktis memberikan pijakan bagi pembuat kebijakan untuk merancang strategi pembangunan desa yang lebih inklusif melalui penguatan inklusi digital, peningkatan transparansi, serta diversifikasi ekonomi berbasis pariwisata pedesaan dan praktik pertanian berkelanjutan. Signifikansi kajian ini terletak pada kontribusinya dalam mengisi celah literatur yang sebelumnya cenderung terfragmentasi antara pendekatan negara-sentris dan komunitas-sentris, sekaligus membuka arah baru bagi penelitian lanjutan yang bersifat komparatif lintas negara untuk mengidentifikasi praktik tata kelola yang dapat ditransfer dan mengeksplorasi peran teknologi digital dalam menjembatani kesenjangan kapasitas pemerintahan desa, sehingga riset di masa depan berpotensi menghadirkan kerangka yang lebih komprehensif dalam menyeimbangkan efisiensi kelembagaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan guna merespons tantangan global seperti urbanisasi, perubahan iklim, dan penguatan ketahanan pedesaan.

REFERENSI

- Abilova, E., Zakharova, E., & Davydov, D. (2021). Rural Entrepreneurship In The Region. *E3S Web Of Conferences*, 258, 06034. <https://doi.org/10.1051/E3sconf/202125806034>
- Ahlers, A. L., Heberer, T., & Schubert, G. (2016). Whither Local Governance In Contemporary China? Reconfiguration For More Effective Policy Implementation. *Journal Of Chinese Governance*, 1(1), 55–77. <https://doi.org/10.1080/23812346.2016.1138700>
- Ahmad Iman Sukri, Kusumastuti, R., & Achmad Lutfi. (2025). A Deconstruction Of Rural Governance Policy To Drive Local Economies. *Journal Of Sustainable Development And Regulatory Issues (JSDERI)*, 3(2), 372–399. <https://doi.org/10.53955/Jsdერი.V3i2.111>
- Al-Ansi, A. M., Garad, A., Jaboo, M., & Al-Ansi, A. (2024). Elevating E-Government: Unleashing The Power Of AI And Iot For Enhanced Public Services. *Heliyon*, 10(23), E40591. <https://doi.org/10.1016/J.Heliyon.2024.E40591>

- Amir, A. F., Jamal, S. A., & Som, A. P. M. (2024). From Perception To Support: The Role Of Political Bureaucracy In Rural Tourism Development In Lombok, Indonesia. *Planning Malaysia*, 22.
- Andrade, A., Aguirre, M., Ayala-Tipan, C., Suntaxi, G., Martinez-Mosquera, D., & Recalde, L. (2025). A Graph-Based Analysis Of Collaboration, Trends, And Ethical Dynamics: Perspectives On Ecuadorian Academic Research. 2025 Eleventh International Conference On Edemocracy & E-government (ICEDEG), 206–213. <https://doi.org/10.1109/ICEDEG65568.2025.11081533>
- Asbetsadik, T., Alemayehu, A., Wolde, D., & Derib, G. (2025). Enhancing The Sustainability Of Rural Water Supply Schemes In Emegua Kebele: The Role Of Community Participation And Key Challenges. *Discover Sustainability*, 6(1), 244. <https://doi.org/10.1007/S43621-025-01098-9>
- Asdar, Y., & Abdullah, M. T. (2024). Realizing The Sustainable Potential Of Indonesian Marine Tourism Through Effective And Participatory Local Tourism Governance. *Edelweiss Applied Science And Technology*, 8(6), 7310–7318. <https://doi.org/10.55214/25768484.V8i6.3584>
- Barbosa, M. W. (2021). Uncovering Research Streams On Agri-Food Supply Chain Management: A Bibliometric Study. *Global Food Security*, 28, 100517. <https://doi.org/10.1016/J.Gfs.2021.100517>
- Belkhamza, Z. (2024). The Innovation's Role In Boosting E-Government Engagement In Global Economies. 30th Americas Conference On Information Systems, AMCIS 2024.
- Benavent-Pérez, M., Gorraiz, J., Gumpenberger, C., & De Moya-Anegón, F. (2012). The Different Flavors Of Research Collaboration: A Case Study Of Their Influence On University Excellence In Four World Regions. *Scientometrics*, 93(1), 41–58. <https://doi.org/10.1007/S11192-012-0638-4>
- Bettis, A., Schoon, M., & Blanchette, G. (2021). Enabling Regional Collaborative Governance For Sustainable Recreation On Public Lands: The Verde Front. *Journal Of Environmental Planning And Management*, 64(1), 101–123. <https://doi.org/10.1080/09640568.2020.1753178>
- Black, R., & Cobbinah, P. B. (2017). On The Rim Of Inspiration: Performance Of AWF Tourism Enterprises In Botswana And Rwanda. *Journal Of Sustainable Tourism*, 25(11), 1600–1616. <https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1296454>
- Budiono, P., Wulandari, C., Apriliani, A. P., & Sari, F. Y. (2024). The Impact Of Village Governance Environmental Management On Community-Based Mangrove Development In Karang City, Bandar Lampung. *International Journal Of Environmental Impacts*, 7(4), 675–683. <https://doi.org/10.18280/Ijei.070408>
- Chen, K., Ding, Y., Zhao, B., Guo, R., & Ning, L. (2025). Benefits Beyond The Local Network: Does Indirect International Collaboration Ties Contribute To Research Performance For Young Scientists? *Research Policy*, 54(5), 105233. <https://doi.org/10.1016/J.Respol.2025.105233>
- Chu, P. Y., & Chiang, S. Y. (2014). A Study Of Establishing Evaluation Indices For Open Government Data. *Proceedings Of The European Conference On E-*

- Government, ECEG, 2014-Janua, 393–401.
- Chunga, B. A., Graves, A., & Knox, J. W. (2023). Evaluating Barriers To Effective Rural Stakeholder Engagement In Catchment Management In Malawi. *Environmental Science & Policy*, 147, 138–146. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.06.006>
- Ćurčić, N., Mirković Svitlica, A., Brankov, J., Bjeljic, Ž., Pavlović, S., & Jandžiković, B. (2021). The Role Of Rural Tourism In Strengthening The Sustainability Of Rural Areas: The Case Of Zlakusa Village. *Sustainability*, 13(12), 6747. <https://doi.org/10.3390/su13126747>
- Das, A. K., & Takahashi, L. M. (2009). Evolving Institutional Arrangements, Scaling Up, And Sustainability. *Journal Of Planning Education And Research*, 29(2), 213–232. <https://doi.org/10.1177/0739456X09348613>
- DAVIES, A. (2009). Understanding Local Leadership In Building The Capacity Of Rural Communities In Australia. *Geographical Research*, 47(4), 380–389. <https://doi.org/10.1111/j.1745-5871.2009.00586.x>
- Del Arco, I., Ramos-Pla, A., Zsembinszki, G., De Gracia, A., & Cabeza, L. F. (2021). Implementing Sdgs To A Sustainable Rural Village Development From Community Empowerment: Linking Energy, Education, Innovation, And Research. *Sustainability*, 13(23), 12946. <https://doi.org/10.3390/su132312946>
- Edward, M., & Nganyi, G. W. W. (2025). Strengthening Community Engagement In Public Policy Development: A Call For Inclusive Governance In Kenya. *Sexuality, Gender & Policy*, 8(3), E70020. <https://doi.org/10.1002/Sgp2.70020>
- Fan, P., Ren, L., & Zeng, X. (2024). Resident Participation In Environmental Governance Of Sustainable Tourism In Rural Destination. *Sustainability*, 16(18), 8173. <https://doi.org/10.3390/su16188173>
- Feng, Z., Li, L., Zhang, J., & Feng, X. (2024). Towards A Communication Ecology In The Life Of Rural Senior Citizens: How Rural Public Spaces Influence Community Engagement. *Sustainability (Switzerland)*, 16(10), 4256. <https://doi.org/10.3390/su16104256>
- Fischer, F. (2012). *Participatory Governance: From Theory To Practice*.
- Fry, A. S., Weaver, M. J. T., Libala, N., Ralekhetla, M. M., Gusha, B., Mtati, N., & Palmer, C. G. (2024). Stepping Stones To Transformative Participatory Governance Capabilities In A Rural Landscape Restoration Project. *Ecosystems And People*, 20(1), 2425378. <https://doi.org/10.1080/26395916.2024.2425378>
- Geng, H., Wu, Y., & Shi, X. (2022). International Collaboration And Research Organization Performance: Evidence From China. *Asian Economic Papers*, 21(3), 60–77. https://doi.org/10.1162/Asep_A_00856
- Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. (2023). Increasing The Performance Of Village Services With Good Governance And Participation. *World Development Sustainability*, 3, 100089. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089>
- Hidayat, R. (2025). Digital Governance And Transparency: How Open Data Initiatives Enhance Government Accountability. *Journal Of Governance And*

- Regulation, 14(3), 194–204. <https://doi.org/10.22495/Jgrv14i3art18>
- Hoang, D. T., Nguyen, N. T., Tran, V. C., & Hwang, D. (2019). Research Collaboration Model In Academic Social Networks. *Enterprise Information Systems*, 13(7–8), 1023–1045. <https://doi.org/10.1080/17517575.2018.1556812>
- Hou, B., Xu, Y., Wang, Z., & Hou, J. (2024). The Role Of Social Fairness Perceptions In Farmers' Continued Participation In Environmental Governance: A China Scenario. *Agricultural Research*, 13(2), 319–327. <https://doi.org/10.1007/S40003-023-00688-1>
- Hu, R., Wang, B., Gao, J., Long, T., Wan, B., & Xie, W. (2025). Big Data Prediction Of Scientific Collaboration Networks Based On Spatiotemporal Dynamics. 2025 International Conference On Sensor-Cloud And Edge Computing System (SCECS), 272–275. <https://doi.org/10.1109/SCECS65243.2025.11065921>
- Huang, X., Gui, Q., Qin, X., & Du, D. (2021). Spatial Evolution Of The Global Scientific Collaborative Network. *Regional Studies, Regional Science*, 8(1), 127–129. <https://doi.org/10.1080/21681376.2021.1905054>
- Jibladze, M., Manvelidze, I., Zoidze, I., & Phartenadze, G. (2024). E-Governance Under The Framework Of Open Governance In Georgia: Current Situation, Problems And Opportunities. *Public Administration And Policy*, 27(2), 193–205.
- Joseph, W. A. (2024). *Politics In China: An Introduction*. Oxford University Press.
- Kadam, D. D. (2024). Community Participation In Solid Waste Management In Rural Maharashtra. In *Solid Waste Management For Rural Regions* (Pp. 69–100). <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-8527-2.Ch005>
- Kitajima, K., & Okamura, K. (2025). The Altering Landscape Of US–China Science Collaboration: From Convergence To Divergence. *Humanities And Social Sciences Communications*, 12(1), 302. <https://doi.org/10.1057/S41599-025-04550-3>
- Lawelai, H., & Nurmandi, A. (2024). Analyzing Smart Cities Governance Publications Using Citespace: Integration Of Organizational Strategy And Human Resources For Sustainable Urban Development. In *Communications In Computer And Information Science: Vol. 1957 CCIS* (Pp. 41–48). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-49212-9_6
- Liangco, N. C., Khong-Khai, S., Leelapattana, W., Thongma, W., Guntoro, B., & Thongma, W. (2024). Wings Of Change: Empowering Agro-Rural Tourism Stakeholders Through A Multifaceted Approach For Sustainable Development. *Multidisciplinary Reviews*, 7(10), 2024232. <https://doi.org/10.31893/Multirev.2024232>
- Lin, Y., Yang, R., & Li, S. (2023). Rural Development Transformation And Social Governance From The Perspective Of Specialization: A Case Study Of Ruiling Village In Guangzhou City, China. *Chinese Geographical Science*, 33(5), 796–812. <https://doi.org/10.1007/S11769-023-1380-Y>
- Liu, G. M., Meadows, M. L., Wiley, K. T., Jurinsky, J., Anglemeyer, A. A., Wang, L. L., Schneider, J. T., & Suiter, S. V. (2023). Network Analysis For Formative Evaluation Of Collaborative, Team Science Research Partnerships. *Evaluation*

- & The Health Professions, 46(4), 334–343.
<https://doi.org/10.1177/01632787231195642>
- Liu, J., Guo, X., Xu, S., Song, Y., & Ding, K. (2023). A New Interpretation Of Scientific Collaboration Patterns From The Perspective Of Symbiosis: An Investigation For Long-Term Collaboration In Publications. *Journal Of Informetrics*, 17(1), 101372. <https://doi.org/10.1016/J.Joi.2022.101372>
- LIU, Z., & YE, C. (2021a). A Logical Framework Of Rural-Urban Governance From The Perspective Of Social-Ecological Resilience. *Progress In Geography*, 40(1), 95–103. <https://doi.org/10.18306/Dlkxjz.2021.01.009>
- LIU, Z., & YE, C. (2021b). A Logical Framework Of Rural-Urban Governance From The Perspective Of Social-Ecological Resilience. *Progress In Geography*, 40(1), 95–103. <https://doi.org/10.18306/Dlkxjz.2021.01.009>
- Ljungberg, D., Mckelvey, M., & Ström, V. (2025). Characterizing Industry Collaborators In Engineering Research: Academic Engagement Between Firms And Chalmers University Of Technology, 2009–2018. *Industry And Higher Education*, 39(4), 439–452.
<https://doi.org/10.1177/09504222251337565>
- Low, W. Y., Tong, W. T., & Gunasegaran, V. (2014). Constraints In Journal Publishing And International Research Collaboration In The Asia Pacific Region. *International Journal Of Information Science And Management*, 12(Specialissue1-2), 13–19.
- Mbaiwa, J. (2011). The Effects Of Tourism Development On The Sustainable Utilisation Of Natural Resources In The Okavango Delta, Botswana. *Current Issues In Tourism*, 14(3), 251–273.
<https://doi.org/10.1080/13683500.2011.555525>
- McNutt, J. G., Justice, J. B., Melitski, J. M., Ahn, M. J., Siddiqui, S. R., Carter, D. T., & Kline, A. D. (2016). The Diffusion Of Civic Technology And Open Government In The United States. *Information Polity*, 21(2), 153–170.
- Mehta, S. A., Dutt, A., Tannirkulam, A., Singh, A. P., Verma, A., Singha, A., Sreenidhi, A., Nandi, A., Ankit, Kumar, A., Dabli, A., P, A., Ramachandran, B., Bansal, C., Sheth, C. S., Dsouza, C., Kumar, D., Sharma, D., Harshita, ... Seth, A. (2024). Initial Observations From Field Testing Of A Digital Participatory Tool To Improve Water Security In Rural India. *Proceedings Of The 13th International Conference On Information & Communication Technologies And Development*, 337–364.
<https://doi.org/10.1145/3700794.3700816>
- Mugambwa, J., Lixia, T., & Xiuli, X. (2025). Community Leadership, Policy Implementation And Rural Revitalization In China: Perspectives For Africa. *Cogent Social Sciences*, 11(1).
<https://doi.org/10.1080/23311886.2025.2535512>
- Muzaqi, A. H., Said, I. N., & Hidayati, F. (2025). The Dynamics Of Collaboration In Empowering Communities Affected By The Development Of Dhoho International Airport, Kediri, Indonesia. *International Journal Of Environmental Sciences*, 845–853.
- Nuraini, H., Gunarto, G., Satyawan, D. S., & . T. (2025). Leveraging Local Potential Through Multi-Stakeholder Collaboration For Sustainable Tourism Village

- Development. *Pakistan Journal Of Life And Social Sciences (PJLSS)*, 23(1), 181–197. <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2025-23.1.0016>
- Nurlinah, Haryanto, & Sunardi. (2020). New Development, Old Migration, And Governance At Two Villages In Jenepono, Indonesia. *World Development Perspectives*, 19, 100223. <https://doi.org/10.1016/J.Wdp.2020.100223>
- Nurmandi, A., Kurniawan, D., Misran, & Salahudin. (2021). A Meta-Analysis Of Big Data Security: How The Government Formulates A Model Of Public Information And Security Assurance Into Big Data. In *Communications In Computer And Information Science: Vol. 1499 CCIS* (Pp. 472–479). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-90179-0_60
- Purnamasari, R., Hasanudin, A. I., Zulfikar, R., & Yazid, H. (2024). Do Internal Control And Information Systems Drive Sustainable Rural Development In Indonesia? *Journal Of Open Innovation: Technology, Market, And Complexity*, 10(1), 100242. <https://doi.org/10.1016/J.Joitmc.2024.100242>
- Qu, Y., Zhao, W., Zhan, L., Cui, Y., & Li, Y. (2025). Unlocking Rural Resources For Revitalization: Examining The Process And Impact Of Compensated Use Of Rural Residential Land Through A Social-Ecological System Framework. *Habitat International*, 166, 103581. <https://doi.org/10.1016/J.Habitatint.2025.103581>
- Rahman, A., Hussain, S. J., Vani, M. S., Velu, C. M., Rajkumar, N., Srinivasa Rao, P. S. V., Babu, G. C., & Kanakaprabha, S. (2025). Optimizing Township Government Administration With Genetic Algorithms For A Green And Sustainable Rural Future. *Engineering, Technology And Applied Science Research*, 15(2), 21895–21902. <https://doi.org/10.48084/Etasr.9769>
- Ramaano, A. I. (2025). Rural Pursuits And Local Climate Change Influence On Subsistence: A Sustainable Tourism Approach To Provincial Environmental Governance And Sustainability Targets. *Management Of Environmental Quality: An International Journal*. <https://doi.org/10.1108/MEQ-07-2024-0303>
- S, K., Rohra, H. A., P, K., Nandan, K., & Padil, V. V. T. (2025). Towards Grassroots Sustainable Development Using Human Centered Design And Participatory Rural Appraisal: A Study In Two Rural Indian Villages. *Sustainable Futures*, 9, 100604. <https://doi.org/10.1016/J.Sftr.2025.100604>
- Sambodo, M. T., Hidayat, S., Rahmayanti, A. Z., Handoyo, F. W., Yuliana, C. I., Hidayatina, A., Purwanto, P., Suryanto, J., Yaumidin, U. K., Nadjib, M., & Astuty, E. D. (2023). Towards A New Approach To Community-Based Rural Development: Lesson Learned From Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2267741. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2267741>
- Setha, D. (2024). Community Empowerment Through Legal Education: Enhancing Legal Awareness In Village Communities. *Bulletin Of Community Engagement*, 4(3), 876–885. <https://www.attractivejournal.com/index.php/bce/>
- Sgroi, F. (2022). Evaluating Of The Sustainability Of Complex Rural Ecosystems During The Transition From Agricultural Villages To Tourist Destinations And Modern Agri-Food Systems. *Journal Of Agriculture And Food Research*, 9, 100330. <https://doi.org/10.1016/J.Jafr.2022.100330>

- Shi (石伟), W., & Dong (董国礼), G. (2022). Supportive Agency And The Statization Of Local Governance: The Practice Of Power Of The Village Governance Body In The Context Of Transformation. *Rural China*, 19(2), 312–330. <https://doi.org/10.1163/22136746-12341291>
- Storey, D. (2009). Economic Development, Rural. In *International Encyclopedia Of Human Geography* (Vols. 1–12, Pp. 310–314). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-008044910-4.00898-1>
- Su, H., Zhao, X., Wang, L., & Li, Y. (2024). How Rural Community Resilience Evolves After A Disaster? A Case Study Of The Eastern Qinghai-Tibetan Plateau, China. *Applied Geography*, 165, 103238. <https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2024.103238>
- Sugiyama, M., Asayama, S., Ishii, A., Kosugi, T., Moore, J. C., Lin, J., Lefale, P. F., Burns, W., Fujiwara, M., Ghosh, A., Horton, J., Kurosawa, A., Parker, A., Thompson, M., Wong, P.-H., & Xia, L. (2017). The Asia-Pacific's Role In The Emerging Solar Geoengineering Debate. *Climatic Change*, 143(1–2), 1–12. <https://doi.org/10.1007/S10584-017-1994-0>
- Sukri, A. I., Kusumastuti, R., & Lutfi, A. (2025). A Deconstruction Of Rural Governance Policy To Drive Local Economies. *Journal Of Sustainable Development And Regulatory Issues (JSDERI)*, 3(2), 372–399.
- Sun, P., Zhou, L., Ge, D., Lu, X., Sun, D., Lu, M., & Qiao, W. (2021). How Does Spatial Governance Drive Rural Development In China's Farming Areas? *Habitat International*, 109, 102320. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2021.102320>
- Suresh Kumar, D., & Joseph, J. (2016). Challenges To Implement E-Governance In Rural India. In *E-Governance In India: Problems, Prototypes And Prospects* (Pp. 25–36).
- Susan, N., & Budirahayu, T. (2018). Village Government Capacity In The Implementation Of Village Law No. 6 Of 2015 In Indonesia. In *Sustainable Future For Human Security* (Pp. 17–27). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5433-4_2
- Syahputra, D. I., Nurmandi, A., & Subekti, D. (2023). Bibliometric Analysis Of Research Publication Trends On The ICT Use In Government Institutions From 2015–2022. In *Lecture Notes In Networks And Systems: Vol. 624 LNNS* (Pp. 54–67). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25344-7_6
- Tang, L., & Hu, G. (2013). Tracing The Footprint Of Knowledge Spillover: Evidence From <Scp>U</Scp> . <Scp>S</Scp> .– <Scp>C</Scp> Hina Collaboration In Nanotechnology. *Journal Of The American Society For Information Science And Technology*, 64(9), 1791–1801. <https://doi.org/10.1002/Asi.22873>
- ULUM, B. (N.D.). Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat Diversifikasi Garam 2025.
- Valderrama, E., Polanco, J., & Hernandez-Diaz, P. M. (2025). <Scp>Does Collaborative Governance Mediate Rural Tourism To Achieve Sustainable Territory Development? Evidence Of Stakeholders' Perceptions In Colombia</Scp>. *Sustainable Development*, 33(1), 493–507. <https://doi.org/10.1002/Sd.3117>

- Wang, T., Wang, D., & Zeng, Z. (2024). Research On The Construction And Measurement Of Digital Governance Level System Of County Rural Areas In China—Empirical Analysis Based On Entropy Weight TOPSIS Model. *Sustainability*, 16(11), 4374. <https://doi.org/10.3390/Su16114374>
- Wang, X., Wang, X., Wu, J., & Zhao, G. (2017). Social Network Analysis Of Actors In Rural Development: A Case Study Of Yanhe Village, Hubei Province, China. *Growth And Change*, 48(4), 869–882. <https://doi.org/10.1111/Grow.12195>
- Wikantiyoso, R., Cahyaningsih, D. S., Sulaksono, A. G., Widayati, S., Poerwoningsih, D., & Triyosoputri, E. (2021). Development Of Sustainable Community-Based Tourism In Kampong Grangsil, Jambangan Village, Dampit District, Malang Regency. *International Review For Spatial Planning And Sustainable Development*, 9(1), 64–77. https://doi.org/10.14246/Irpspd.9.1_64
- Xia, S. (2017). E-Governance And Political Modernization: An Empirical Study Based On Asia From 2003 To 2014. *Administrative Sciences*, 7(3), 25. <https://doi.org/10.3390/Admsci7030025>
- Xu, H., Pittock, J., & Daniell, K. A. (2021). China: A New Trajectory Prioritizing Rural Rather Than Urban Development? *Land*, 10(5), 514. <https://doi.org/10.3390/Land10050514>
- Xue, Z., Li, C., & Yating, Z. (2024). The Governance Of Rural Tourism Destination Under The Eco-Bank Model—A Case Study Of Jukou Township In Fujian Province. *Journal Of Resources And Ecology*, 15(6), 1666–1678. <https://doi.org/10.5814/J.Issn.1674-764x.2024.06.022>
- Yang, J., Yu, L., & Zhang, J. (2024). Impacts On Rural Community Development And Governance By Different Land Ownership: A Comparative Study Based On Two Villages In China. *The European Journal Of Development Research*, 36(6), 1616–1635. <https://doi.org/10.1057/S41287-024-00653-W>
- Yao, H., Huang, G., Feng, S., Chen, Z., & Guo, Y. (2018a). Paths To Rural Governance Based On Cultural Identity And Participatory Capacity: A Social Practice Of A Village In East Hubei. *Tropical Geography*, 38(3), 405–412. <https://doi.org/10.13284/J.Cnki.Rddl.003037>
- Yao, H., Huang, G., Feng, S., Chen, Z., & Guo, Y. (2018b). Paths To Rural Governance Based On Cultural Identity And Participatory Capacity: A Social Practice Of A Village In East Hubei. *Tropical Geography*, 38(3), 405–412. <https://doi.org/10.13284/J.Cnki.Rddl.003037>
- YE, C., YU, J., ZHANG, Q., & ZHU, X. (2021). From Governance To Rural-Urban Co-Governance: Research Frontiers, Trends, And The Chinese Paths. *Progress In Geography*, 40(1), 15–27. <https://doi.org/10.18306/Dlxxjz.2021.01.002>
- Ying, B., Li, S., Xiong, K., Hou, Y., Liu, T., & Sun, R. (2023). Research On The Resilience Assessment Of Rural Landscapes In The Context Of Karst Rocky Desertification Control: A Case Study Of Fanhua Village In Guizhou Province. *Forests*, 14(4), 733. <https://doi.org/10.3390/F14040733>
- Zavratnik, V., Podjed, D., Trilar, J., Hlebec, N., Kos, A., & Stojmenova Duh, E. (2020). Sustainable And Community-Centred Development Of Smart Cities And Villages. *Sustainability*, 12(10), 3961.

<https://doi.org/10.3390/Su12103961>

Zhang, D., Ding, W., Wang, Y., & Liu, S. (2022). Exploring The Role Of International Research Collaboration In Building China's World-Class Universities. *Sustainability*, 14(6), 3487.

<https://doi.org/10.3390/Su14063487>

Zhang, M., Yao, Y., & Whittam, G. (2018). Practice Evaluation Of Community Initiatives For Social Service Delivery In A Deprived Neighborhood In Scotland. *Journal Of Social Service Research*, 44(1), 50–62.

<https://doi.org/10.1080/01488376.2017.1395383>

Zulgani, Z., Junaidi, J., Hastuti, D., Rustiadi, E., Pravitasari, A. E., & Asfahani, F. R. (2023). Understanding The Emergence Of Rural Agrotourism: A Study Of Influential Factors In Jambi Province, Indonesia. *Economies*, 11(7), 180.

<https://doi.org/10.3390/Economies11070180>